

Implementasi Peran TNI dalam Mewujudkan Swasembada Pangan Terhadap Peningkatan Ketahanan Nasional (Studi Kasus Program Ketahanan Pangan Kostrad di Kabupaten Sukabumi)

Implementation of TNI's Role in Realising Food Self-Sufficiency towards Increasing National Resilience (Case Study of Kostrad Food Security Programme in Sukabumi Regency)

Aris Prasetyo

Sekolah TNI AD, Jakarta, Indonesia

*Corresponding author: bunga.yunielida16@gmail.com

Article Info

Received:
20/09/2024;

Received in revised form:
09/04/2025;

Accepted:
30/09/2025;

Available online:
30/09/2025;

2549-9505/© 2025 The Authors. Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

DOI:
[10.30595/jssh.v9i2.24017](https://doi.org/10.30595/jssh.v9i2.24017)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi TNI dalam meningkatkan produksi pangan melalui Program Ketahanan Pangan Kostrad di Kabupaten Sukabumi, dampak Program Ketahanan Pangan Kostrad terhadap peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani di Kabupaten Sukabumi, serta kerjasama antara Menteri Pertanian dengan TNI AD melalui Kostrad di Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan ketahanan nasional. Metode kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman makna dan pengalaman individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Metode ini bertujuan untuk menjelajahi dan memahami fenomena yang kompleks dan tidak dapat diukur dengan mudah. Pengumpulan data dilakukan secara non-numerik melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Markas Besar TNI Angkatan Darat, teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penampilan, dan analisis data. TNI melalui Kostrad, berperan penting dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Sukabumi dengan memberikan pelatihan teknis, menyediakan infrastruktur pertanian, dan membuka lahan baru. Program Ketahanan Pangan Kostrad membantu meningkatkan produktivitas petani, memperbaiki pengelolaan irigasi, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Kerjasama dengan Kementerian Pertanian memperkuat ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani. TNI merupakan peran kunci dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Sukabumi. Dengan memanfaatkan potensi pertanian setempat, TNI bertindak sebagai fasilitator dan pendukung utama dalam mencapai ketahanan pangan. Melalui pendampingan teknis, penyediaan sarana pertanian, dan pengelolaan infrastruktur seperti irigasi, TNI membantu petani memperbaiki keterampilan dan efisiensi mereka. Program ini juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani dan taraf hidup mereka, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Dukungan dari pemerintah dan TNI berperan penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program.

Kata Kunci: TNI; peran; Angkatan Darat; pertanian; Sukabumi

This research aims to analyze the role and function of the TNI (Indonesian National Armed Forces) in increasing food production through the Kostrad (Army Strategic Command) Food Security Program in Sukabumi Regency, the impact of the Kostrad Food Security Program on improving the income and standard of living of farmers in Sukabumi Regency, and the cooperation between the Minister of Agriculture and the Indonesian Army (TNI AD) through Kostrad in Sukabumi Regency in realizing food self-sufficiency and enhancing national security. The qualitative method is a research approach that focuses on understanding the meaning and experiences of individuals or groups in a specific context. This method aims to explore and understand complex phenomena that cannot be easily measured. Data collection is conducted non-numerically through observation, interviews, and documentation techniques. The research location was at the TNI Army Headquarters; data analysis techniques consisted of data collection, data reduction, data display, and data analysis. The TNI, through Kostrad, plays an important role in increasing food production in Sukabumi Regency by providing technical training, supplying agricultural infrastructure, and opening new land. The Kostrad Food Security Program helps increase farmer productivity, improve irrigation management, and enhance farmers' income and standard of living. Cooperation with the Ministry of Agriculture strengthens national food security and farmer welfare. The TNI plays a key role in increasing food production in Sukabumi Regency. By leveraging local agricultural potential, the TNI acts as a facilitator and main supporter in achieving food security. Through technical assistance, providing agricultural facilities, and managing infrastructure such as irrigation, the TNI helps farmers improve their skills and efficiency. This program also contributes to increasing farmers' incomes and their standard of living, as well as supporting national food security. Support from the government and the TNI is vital in ensuring the success and sustainability of the program.

Keywords: TNI; role; Army; agriculture; Sukabumi



This is an open access article under the CC BY license

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

1. Pendahuluan

Dalam upaya menjaga keutuhan suatu negara, penting untuk mengelola dua fungsi utama, yaitu pertahanan dan keamanan, secara holistik. Pertahanan berfokus pada perlindungan dari ancaman eksternal seperti serangan militer, sedangkan keamanan berkaitan dengan kondisi bebas dari ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan masyarakat. Keduanya saling mendukung; pertahanan yang kuat dapat menciptakan keamanan yang stabil, yang pada gilirannya mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa, serta meningkatkan ketahanan nasional (Mardhani, 2020; Lemhanas RI, 2024). Ketahanan nasional mencakup semua aspek kehidupan untuk menghadapi ancaman. Pertahanan dan keamanan tidak hanya melibatkan aspek militer tetapi juga nirmiliter, seperti

ketahanan pangan, yang krusial dalam konteks krisis global, seperti konflik antara Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi pasokan gandum ke Indonesia (Safardan et al., 2023; Balontia et al., 2019).

Indonesia, dengan mayoritas penduduknya bergantung pada pertanian, harus fokus pada swasembada pangan sebagai indikator ketahanan nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengartikan pangan sebagai produk dari berbagai sektor yang harus memenuhi kebutuhan manusia, baik dari segi kuantitas, kualitas, serta keamanan (Suryawati, 2019). Namun, Indonesia menghadapi tantangan serius, termasuk alih fungsi lahan, bencana alam, perubahan iklim, dan ketergantungan pada impor pangan (BPS, 2023; BNPB, 2024; Apriyana et al., 2016). Untuk mengatasi ketergantungan impor, strategi swasembada pangan perlu diterapkan dengan meningkatkan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan luas tanam, penerapan teknologi pertanian, dan diversifikasi konsumsi pangan (Hakim & Irawan, 2019). TNI, melalui Program Ketahanan Pangan Kostrad, berperan penting dalam upaya ini dengan memberdayakan wilayah pertanian dan membantu kesejahteraan petani di daerah seperti Kabupaten Sukabumi (Azizah & Suhartini, 2021).

Penelitian ini fokus pada implementasi peran TNI dalam mewujudkan swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Studi ini akan menganalisis strategi, dampak, dan kontribusi Program Ketahanan Pangan Kostrad di Kabupaten Sukabumi, serta kerjasama antara Menteri Pertanian dan TNI AD. Tujuan penelitian adalah untuk memahami peran TNI, mengevaluasi dampak program terhadap pendapatan petani, dan menganalisis kerjasama dalam mencapai swasembada pangan. Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi teoritis dalam memahami hubungan antara peran TNI dan ketahanan pangan, serta manfaat praktis bagi pemerintah, TNI, petani, dan peneliti selanjutnya dalam merumuskan kebijakan dan program yang efektif.

Tinjauan Pustaka

Teori Pertahanan Negara adalah cabang ilmu yang dirancang untuk memahami dan mengelola upaya-upaya dalam melindungi kedaulatan dan integritas negara dari berbagai ancaman (Prasetyo dkk, 2022). Fokus utama dari teori ini adalah bagaimana negara dapat mempertahankan diri dan menjaga stabilitasnya di tengah ancaman yang kompleks dan bervariasi. Pertahanan negara mencakup berbagai disiplin ilmu—militer, politik, ekonomi, dan social yang memerlukan pendekatan lintas disiplin yang terintegrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, konsep ini meliputi upaya-upaya untuk memelihara kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan warga negara. Pertahanan negara harus mengelola sumber daya dan kekuatan nasional baik dalam situasi damai, konflik, maupun pasca-konflik (Makmur Supriyatno, 2014). Ancaman terhadap negara dapat berasal dari dalam atau luar negeri dan dapat berupa ancaman militer, non-militer, atau hybrid. Ancaman militer mencakup agresi, pelanggaran wilayah, terorisme, pemberontakan, dan spionase, sedangkan ancaman non-militer meliputi bencana alam, krisis ekonomi, dan gangguan keamanan siber (Indriyani dkk, 2022). Sistem pertahanan negara Indonesia melibatkan tiga komponen utama:

1. **Komponen Utama:** TNI dan Polri, yang bertugas menjaga kedaulatan negara dan keamanan dalam negeri, serta melakukan operasi militer baik dalam perang maupun situasi damai.
2. **Komponen Cadangan:** Sumber daya nasional yang siap digerakkan melalui mobilisasi untuk memperkuat kekuatan TNI dan Polri dalam situasi darurat atau perang.
3. **Komponen Pendukung:** Sumber daya yang mendukung dan memperkuat TNI dan Polri, termasuk sumber daya alam, industri strategis, dan tenaga terlatih.

Ketiga komponen ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan sistem pertahanan yang tangguh, dengan koordinasi yang erat di antara mereka (Pasal 5 UU No. 3 Tahun 2002). Sistem ini dirancang untuk melibatkan semua elemen negara, memastikan bahwa setiap warga negara berpartisipasi dalam upaya pertahanan, dan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya nasional.

Secara keseluruhan, teori pertahanan negara menekankan pentingnya integrasi antara berbagai komponen dan pendekatan yang menyeluruh dalam menghadapi ancaman, serta perlunya kolaborasi dan koordinasi di seluruh aspek pertahanan. Dalam konteks strategi perang, pemahaman tentang teori-

teori dasar sangat penting untuk merancang strategi yang efektif. Teori-teori ini memberikan panduan dalam merumuskan pendekatan yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi konflik. Salah satu teori utama adalah teori Clausewitzian yang dikembangkan oleh Carl von Clausewitz. Dalam karyanya yang terkenal, *On War*, Clausewitz mengemukakan bahwa perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Dia menekankan bahwa penggunaan kekuatan militer harus selaras dengan tujuan politik yang ingin dicapai. Dengan pandangan ini, Clausewitz melihat perang sebagai fenomena kompleks yang melibatkan aspek militer, politik, dan sosial, dengan tujuan utama untuk menumbangkan kekuatan musuh dan mencapai hasil politik yang diinginkan.

Selanjutnya, Antoine-Henri Jomini, melalui bukunya *The Art of War*, menyoroti pentingnya logistik dan manuver dalam peperangan. Jomini berpendapat bahwa kemenangan dapat dicapai dengan mengkonsentrasikan kekuatan di titik-titik strategis dan mengalahkan musuh secara terencana. Konsep utamanya adalah konsentrasi kekuatan dan pengambilan keputusan strategis yang jelas di titik-titik kritis medan perang.

Sir Basil Liddell Hart, dalam bukunya *Strategy: The Indirect Approach*, memperkenalkan konsep strategi tidak langsung. Liddell Hart berargumen bahwa pendekatan yang lebih efektif adalah melalui strategi tidak langsung, yaitu dengan menggunakan manuver dan serangan balik daripada serangan frontal langsung. Konsep *Ends, Ways, and Means* yang dikemukakannya menekankan pentingnya keseimbangan antara tujuan (*Ends*), metode (*Ways*), dan sumber daya (*Means*) dalam merumuskan strategi perang. Konsep *Ends, Ways, and Means* merupakan kerangka kerja penting dalam strategi perang. *Ends* merujuk pada tujuan akhir yang ingin dicapai dalam suatu konflik, yang harus jelas, terukur, dan dapat dicapai. *Ways* adalah metode dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk strategi, taktik, dan manuver militer. *Means* mencakup sumber daya dan alat yang tersedia untuk melaksanakan metode yang dipilih, seperti pasukan, senjata, peralatan, dan logistik.

Jenis peperangan dapat dibagi menjadi perang konvensional dan peperangan asimetris. Perang konvensional melibatkan konflik terbuka dengan pertempuran fisik sesuai aturan internasional, seperti Konvensi Jenewa. Fokus utamanya adalah pada penggunaan kekuatan militer dan teknologi perang. Sebaliknya, peperangan asimetris terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang lebih lemah sering menggunakan taktik non-konvensional seperti gerilya, terorisme, atau propaganda untuk melawan pihak yang lebih kuat. Keterkaitan antara strategi perang dan ketahanan pangan sangat signifikan. Dalam perang konvensional, konflik militer dapat merusak infrastruktur pertanian, mengganggu produksi pangan, dan menyebabkan krisis pangan. Serangan terhadap fasilitas pertanian atau pemblokiran jalur distribusi dapat mengakibatkan kekurangan pangan di wilayah yang terkena dampak. Di sisi lain, dalam peperangan asimetris, ketidakstabilan yang dihasilkan dapat mengganggu distribusi pangan, akses ke lahan pertanian, dan rantai pasok pangan. Ketidakamanan yang ditimbulkan oleh kelompok bersenjata non-negara dapat menghambat aktivitas pertanian dan distribusi pangan.

Teori ketahanan pangan melibatkan kapasitas suatu negara atau wilayah untuk memastikan ketersediaan pangan secara berkelanjutan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan kualitas pangan, serta mengatasi kelaparan, malnutrisi, dan ketidakstabilan sosial. Ketahanan pangan sangat penting di tingkat nasional dan global untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, ketahanan pangan berkaitan erat dengan delapan aspek ketahanan nasional yang dikenal sebagai *astagatra*, yaitu penduduk, sumber daya alam, wilayah, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kesejahteraan masyarakat, produksi pangan, distribusi, dan kebijakan pangan semuanya memainkan peran penting dalam memastikan ketahanan pangan.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang teori strategi perang dan ketahanan pangan membantu dalam merancang kebijakan dan strategi yang dapat menjaga stabilitas nasional dan mengurangi dampak negatif dari konflik terhadap ketersediaan pangan. Implementasi kebijakan merupakan proses penting yang melibatkan penerapan kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Browne dan Wildavsky (1999) mendefinisikan implementasi sebagai "perluasan aktivitas yang saling

menyesuaikan," menekankan bahwa proses ini melibatkan penyesuaian berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebaliknya, Muharika (2019) menggambarkan implementasi sebagai rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan kebijakan kepada masyarakat sehingga hasilnya sesuai dengan harapan. Tahapan dalam proses implementasi mencakup beberapa langkah kunci. Pertama, ada kebutuhan untuk menyiapkan aturan detail yang dapat menginterpretasikan kebijakan dengan jelas. Langkah berikutnya adalah pengadaan sumber daya yang diperlukan, termasuk sarana, prasarana, dan dana, serta penetapan tanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan kepada masyarakat juga merupakan aspek penting, memastikan bahwa kebijakan dipahami dan diterima oleh kelompok sasaran. Implementasi tidak hanya melibatkan entitas administratif, tetapi juga melibatkan interaksi dengan jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi hasil akhir.

Syukur dalam Surmayadi (2005) mengidentifikasi tiga unsur kunci yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Pertama, kebijakan itu sendiri harus jelas dan terarah. Kedua, kelompok sasaran atau target group yang akan menerima manfaat dari kebijakan tersebut harus ditentukan dengan baik. Ketiga, unsur pelaksana—baik individu maupun organisasi harus bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengawasi implementasi kebijakan dengan efektif. Terdapat beberapa teori yang relevan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Teori George C. Edwards III (1980) menyoroti empat variabel utama: komunikasi yang jelas mengenai tujuan dan sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia dan finansial, disposisi atau karakteristik implementor yang mempengaruhi pelaksanaan, dan struktur birokrasi yang dapat mempengaruhi efisiensi implementasi.

Merilee S. Grindle (1980) mengarahkan perhatian pada dua variabel utama: substansi kebijakan, yang mencakup kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat, dan dukungan sumber daya, serta lingkungan kebijakan, yang mencakup kekuasaan aktor, karakteristik lembaga, dan tingkat kepatuhan kelompok sasaran. Grindle menekankan bahwa kompleksitas kebijakan dapat mempengaruhi tingkat kesulitan implementasi. David L. Weimer dan Aidan R. Vining (2009) mengidentifikasi tiga kelompok variabel penting: logika kebijakan, yang melibatkan keberhasilan kebijakan berdasarkan teori yang masuk akal, lingkungan kebijakan yang mencakup aspek sosial, politik, dan ekonomi, serta kemampuan implementor yang mencerminkan kompetensi dan keterampilan dalam melaksanakan kebijakan.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada bagaimana berbagai faktor ini berinteraksi dan bagaimana kebijakan tersebut dikelola dalam konteks lingkungan yang lebih luas. Implementasi yang efektif memerlukan perhatian terhadap detail-detail ini agar kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan hasil yang positif bagi masyarakat.

2. Metode

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dan pengalaman individu atau kelompok dalam konteks tertentu, seperti yang diuraikan oleh Creswell (2017). Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memahami fenomena kompleks yang mungkin tidak dapat diukur dengan metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interpretatif untuk memperoleh wawasan mendalam dan kontekstual. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki satu atau beberapa kasus secara mendalam, memahami kompleksitasnya, dan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi fenomena tersebut. Meskipun hasil dari pendekatan ini bersifat kontekstual dan tidak selalu dapat digeneralisasikan, temuan yang diperoleh sangat berharga untuk memahami kasus yang diteliti secara mendalam.

Penelitian ini direncanakan berlangsung di beberapa lokasi penting yang berkaitan dengan topik penelitian. Lokasi penelitian meliputi Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD) yang terletak di Jalan Medan Merdeka Utara No. 2, Jakarta Pusat; Markas Komando Cadangan Strategis

Angkatan Darat (Kostrad) di Jl. Merdeka Timur No. 03, Jakarta Pusat; Kantor Bupati Kabupaten Sukabumi di Jl. Siliwangi Palabuhanratu No.10, Sukabumi, Jawa Barat; dan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi di Jl. Raya Cisolok - Pelabuhanratu No.Km. 10, Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama enam bulan, mulai dari Maret hingga Agustus 2024. Subjek penelitian mencakup berbagai individu, kelompok, atau instansi yang berhubungan dengan topik penelitian. Ini termasuk pejabat teritorial di Mabes TNI, pejabat teritorial di Kostrad, pejabat pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, pejabat dinas pertanian Kabupaten Sukabumi, serta anggota kelompok tani di Kabupaten Sukabumi. Peneliti akan menggunakan kode untuk mengidentifikasi narasumber, yang mencakup pejabat tinggi, anggota dinas pertanian, dan ketua kelompok tani yang relevan dengan kajian ketahanan pangan nasional.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman kontekstual tentang fenomena yang diteliti. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mendalam dari narasumber, sementara dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen atau arsip yang relevan. Peneliti juga akan melakukan studi literatur untuk memperkaya pemahaman tentang topik penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti mengikuti kriteria yang dikemukakan oleh Bungin (2008), seperti kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dicapai dengan meningkatkan partisipasi peneliti, melakukan observasi terus-menerus, dan menggunakan triangulasi metode. Transferabilitas dicapai dengan memberikan gambaran jelas tentang fokus penelitian. Dependabilitas dan konfirmabilitas dicapai dengan memastikan konsistensi penelitian dan memeriksa kualitas hasil serta konsistensi dalam mengumpulkan dan menginterpretasi data.

Analisis data dilakukan dengan merujuk pada model Miles dan Huberman (1994), yang mencakup langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penampilan data, dan kesimpulan serta verifikasi. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menyaring data yang relevan, menyajikannya dalam format yang memudahkan analisis, dan menarik kesimpulan yang valid berdasarkan temuan.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam proses analisis data kualitatif, peneliti mengolah data hasil wawancara dan studi pustaka dengan pendekatan yang sistematis. Tahap analisis ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, pola, dan unit tertentu guna memperoleh pemahaman mendalam tentang kasus yang diteliti. Peneliti menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tiga langkah utama: (a) Kondensasi data, yakni menyederhanakan dan memfokuskan data, (b) Penyajian data dalam bentuk naratif, dan (c) Penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat yang menjadi variabel penelitian.

Peran dan Fungsi TNI dalam Meningkatkan Produksi Pangan melalui Program Ketahanan Pangan Kostrad di Kabupaten Sukabumi

Informan A2 mengungkapkan bahwa TNI berperan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan akses kepada petani untuk teknologi pertanian modern, bahan tanaman berkualitas, dan input pertanian seperti pupuk. Kerja sama dengan Kementerian Pertanian RI menunjukkan komitmen TNI untuk membangun kemitraan lintas sektor dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Melalui sosialisasi dan pendampingan teknis, TNI turut meningkatkan kapasitas petani setempat, memperkenalkan teknik bertani yang lebih efektif, serta memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dan komunitas petani. Inisiatif ini membantu menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan fluktuasi pasar. Dalam konteks ini, TNI berperan penting dalam mengatasi masalah ketahanan pangan dengan mendukung petani melalui penyediaan alat pertanian modern, bibit, dan pupuk. Program ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diidentifikasi dalam penelitian terdahulu, seperti yang diungkapkan oleh Prasetya (2018), yang menunjukkan bahwa pendampingan teknis meningkatkan partisipasi petani dan hasil produksi pertanian. Kerjasama antara TNI, pemerintah daerah, dan Kementerian Pertanian berfokus pada

peningkatan kapasitas petani melalui pendampingan dan penyuluhan yang efektif, serta pengenalan teknik pertanian modern.

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk kehidupan manusia, dan untuk memenuhi kebutuhan ini, masyarakat memiliki peran utama dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi pangan. Pemerintah bertindak sebagai regulator dengan menetapkan kebijakan dan standar yang harus dipatuhi. Kabupaten Sukabumi, dengan potensi pertanian yang melimpah, membutuhkan dukungan yang lebih dari sekadar regulasi untuk mengoptimalkan potensi ini. Dalam konteks ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memainkan peran strategis melalui program Ketahanan Pangan Kostrad. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI memiliki tugas untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi keselamatan bangsa, termasuk dalam aspek non-militer seperti peningkatan produksi pangan. Kostrad, sebagai salah satu unit TNI, terlibat langsung dalam kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dengan menyediakan pendampingan teknis kepada petani, mengelola dan membangun infrastruktur pertanian, serta memperkenalkan teknologi pertanian terbaru.

Program Ketahanan Pangan Kostrad mencakup berbagai kegiatan mulai dari pelatihan teknis untuk petani mengenai teknik pertanian modern, pengelolaan tanah, hingga penggunaan pupuk dan pestisida yang efektif. TNI juga berperan dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur pertanian seperti sistem irigasi dan alat pertanian modern, serta membantu dalam pembukaan dan pengelolaan lahan pertanian baru. Selain itu, TNI juga memberikan dukungan dalam hal pelatihan teknis dan penyediaan alat pertanian yang mempercepat proses produksi, serta membantu dalam pengelolaan irigasi untuk memastikan pasokan air yang cukup selama musim kemarau. Dengan adanya fasilitas seperti pompa air dan sistem irigasi yang baik, petani dapat lebih mudah mengelola lahan mereka dan meningkatkan hasil panen.

Dampak Program Ketahanan Pangan Kostrad terhadap Peningkatan Pendapatan dan Taraf Hidup Petani di Kabupaten Sukabumi

Program ketahanan pangan yang diprakarsai oleh TNI mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, yang menyediakan anggaran tambahan, infrastruktur pertanian, dan pelatihan untuk petani. Dukungan ini juga meliputi peningkatan akses petani terhadap teknologi pertanian modern dan inovasi. Pemerintah daerah aktif memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan kepada petani, memastikan bahwa peningkatan produksi pangan dapat dicapai secara berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah daerah, program ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Program Ketahanan Pangan Kostrad bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dengan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam sektor pertanian. Dengan adanya dukungan dari TNI, petani di Kabupaten Sukabumi mendapatkan akses kepada alat-alat pertanian yang lebih baik, pelatihan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Peningkatan pendapatan petani berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengadopsi teknologi pertanian yang lebih efisien. Penelitian Umami (2023) menyoroti pentingnya kolaborasi dan komunikasi sosial dalam mengoptimalkan ketahanan pangan. Hasil tersebut relevan dengan konteks Sukabumi, di mana kehadiran TNI berfungsi sebagai penghubung antara petani dan sumber daya yang dibutuhkan. Program ini tidak hanya meningkatkan hasil pertanian tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan petani, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi di daerah tersebut.

Program ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani di Kabupaten Sukabumi. Beberapa dampak utama dari program ini termasuk:

1. Produktivitas yang lebih tinggi: Dengan penerapan teknik pertanian modern dan penggunaan alat pertanian canggih, hasil panen meningkat secara signifikan.
2. Peningkatan keterampilan teknis dan pengetahuan budidaya tanaman: Pelatihan yang diberikan oleh TNI membantu petani mengadopsi praktik pertanian yang lebih efisien.

3. Akses pengolahan pertanian yang semakin mudah: Penyediaan alat dan mesin pertanian modern mempermudah proses pengolahan tanah, penanaman, dan panen.
4. Pendapatan individu petani yang meningkat: Dengan hasil panen yang lebih baik dan efisiensi yang meningkat, pendapatan petani mengalami kenaikan.
5. Pengelolaan irigasi yang lebih efektif: Distribusi pompa air membantu petani mengelola pasokan air dengan lebih baik, meningkatkan hasil panen.
6. Kerjasama antara Menteri Pertanian dengan TNI AD melalui Kostrad di Kabupaten Sukabumi dalam Mewujudkan Swasembada Pangan dan Meningkatkan Ketahanan Nasional

Kerja sama antara Kementerian Pertanian dan TNI AD mencakup beberapa langkah penting:

Perencanaan Bersama: Kementerian Pertanian dan TNI merencanakan program ketahanan pangan dengan menilai dan menentukan lahan yang sesuai serta kebutuhan teknis dan finansial. Kementerian Pertanian menyediakan dukungan teknis dan rekomendasi lahan, sementara TNI memastikan aspek keamanan dan logistik.

Implementasi di Lapangan: Kementerian Pertanian memberikan bantuan kepada kelompok tani (Poktan) dalam pengajuan kebutuhan alsintan, bibit, dan pupuk. TNI bertanggung jawab atas distribusi dan penggunaan alat, serta pemasangan pompa irigasi untuk mendukung akses air yang stabil bagi petani.

Pendampingan dan Pelatihan: Pelatihan untuk petani meliputi penggunaan teknik pertanian modern, alat pertanian, dan pengelolaan irigasi. TNI memberikan dukungan teknis dan logistik langsung kepada petani, memastikan bahwa mereka dapat bekerja secara efisien dan aman.

Monitoring dan Evaluasi: Kementerian Pertanian dan TNI secara rutin memonitor dan mengevaluasi implementasi program untuk memastikan bahwa setiap tahap berjalan sesuai rencana. Data dan masukan dari petani digunakan untuk memperbaiki strategi dan mencapai hasil optimal. Kerja sama antara Kementerian Pertanian, TNI AD, dan petani melalui konsep tripel helix diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Sukabumi secara signifikan.

Kerjasama antara Kementerian Pertanian dan TNI AD melalui Kostrad di Sukabumi mencerminkan pendekatan strategis dalam mewujudkan swasembada pangan. Kolaborasi ini melibatkan beberapa komponen kunci:

Pendampingan Teknis: TNI AD memberikan pelatihan teknis kepada petani tentang pertanian modern dan manajemen lahan. **Penyediaan Lahan Pertanian:** Identifikasi dan pembukaan lahan pertanian baru untuk meningkatkan produktivitas. **Distribusi Alsintan:** Penyediaan alat dan mesin pertanian untuk efisiensi dan peningkatan hasil panen. **Pengembangan Sistem Irigasi:** Membangun dan mengelola sistem irigasi untuk memastikan pasokan air yang cukup.

Kerjasama ini mencerminkan sinergi antara sektor pertanian dan pertahanan dalam mencapai tujuan ketahanan pangan. Penelitian oleh Indah, Riswanda, dan Nurrohman (2022) mengenai tata kelola kolaboratif antara TNI dan POLRI menunjukkan bahwa sinergi antara berbagai lembaga memperkuat efektivitas program ketahanan pangan. Begitu pula, di Sukabumi, kombinasi dari dukungan teknis dan pendampingan oleh TNI serta kebijakan dan pelatihan oleh Kementerian Pertanian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, kerjasama ini adalah langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, dengan memanfaatkan kekuatan dan keahlian masing-masing pihak untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kerjasama antara Kementerian Pertanian dan TNI AD melalui Kostrad di Kabupaten Sukabumi bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan ketahanan nasional. Program ini melibatkan berbagai inisiatif, seperti penggunaan teknologi pertanian modern, penyuluhan dan pelatihan bagi petani, serta pembangunan infrastruktur pertanian. Kementerian Pertanian menyediakan materi pelatihan dan dukungan teknis, sementara TNI mengorganisir dan memfasilitasi kegiatan di lapangan. TNI juga berperan dalam pembangunan infrastruktur irigasi dan

penyediaan alat pertanian yang modern. Kerjasama ini mencerminkan pendekatan holistik untuk mengatasi tantangan dalam produksi dan distribusi pangan, serta membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Dengan dukungan ini, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat diperkuat, dan swasembada pangan dapat tercapai, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan stabilitas sosial-ekonomi negara.

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa TNI memegang peran krusial dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi. TNI bertindak sebagai pelaksana, fasilitator, dan pendukung utama dalam upaya ini. Mereka tidak hanya memberikan pendampingan teknis dan pelatihan kepada petani, tetapi juga menyediakan alat pertanian modern dan infrastruktur irigasi yang efisien. Program Ketahanan Pangan Kostrad di Sukabumi merupakan contoh konkret kontribusi TNI, yang berhasil meningkatkan produktivitas petani dan mendukung ketahanan pangan nasional. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen TNI terhadap kesejahteraan masyarakat dan tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Program Ketahanan Pangan Kostrad juga telah meningkatkan pendapatan petani dan kondisi sosial-ekonomi mereka secara langsung. Dengan mengurangi ketergantungan pada metode pertanian tradisional dan memanfaatkan teknologi modern, program ini telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan petani. Keberhasilan program ini memerlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan TNI serta pemantauan dan evaluasi yang konsisten. Kerjasama antara Kementerian Pertanian dan TNI melalui Kostrad menunjukkan sinergi yang efektif dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan dan memberikan manfaat yang dapat diterapkan di wilayah lain dengan tantangan serupa.

Selain itu, pendekatan yang meliputi pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan teknologi pertanian, dan pelatihan petani telah mengatasi berbagai tantangan dalam produksi dan distribusi pangan. Integrasi kebijakan pemerintah dan dukungan teknis dari TNI menciptakan sistem pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan hasil produksi tetapi juga memperbaiki kondisi sosial-ekonomi petani, dengan manfaat jangka panjang yang diharapkan. Dukungan berkelanjutan dan koordinasi antara semua pemangku kepentingan sangat penting untuk memperluas dan mempertahankan keberhasilan program ini.

Saran

Untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi secara praktis, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, pelatihan teknologi pertanian terkini harus difokuskan pada sistem irigasi modern dan metode budidaya ramah lingkungan, yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Penguatan kapasitas penyuluh pertanian juga penting untuk memberikan bimbingan teknis intensif kepada petani, memastikan penerapan praktik terbaik. Selain itu, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, seperti sistem irigasi, harus menjadi prioritas untuk memastikan distribusi air yang efisien. Peningkatan akses pasar, bantuan logistik, dan dukungan finansial juga krusial untuk mengurangi beban biaya produksi petani dan meningkatkan keuntungan mereka. Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan sangat diperlukan untuk menilai efektivitasnya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik dari petani.

Secara teoritis, pendekatan holistik dalam pengembangan pertanian memerlukan integrasi kebijakan pemerintah dengan praktik lapangan yang aplikatif. Melibatkan petani secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan kualitas implementasi. Penelitian berkelanjutan juga diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Evaluasi kinerja dan efisiensi program, serta pengembangan model kerjasama multi-pihak yang melibatkan pemerintah, militer, dan sektor swasta, dapat membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif. Terakhir, penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diterjemahkan dengan baik dalam praktik, agar hasil yang dicapai sesuai dengan

tujuan yang diharapkan. Pendekatan holistik yang melibatkan semua elemen ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program ketahanan pangan, menjadikannya responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Referensi

- Apriyana, Y., Susanti, E., Suciantini, Ramadhani F, & Surmaini, E. 2016. Analisis dampak perubahan iklim terhadap produksi tanaman pangan pada lahan kering dan rancang bangun sistem informasinya. Indonesian Agency for Agricultural Research and Development.
- Azizah, R. N., & Suhartini, A. M. A. 2021. Pengaruh Sektor Industri, Sektor Pertanian, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Jawa Barat Tahun 2015-2019. In Seminar Nasional Official Statistics (Vol. 2021, No. 1, pp. 743-752).
- Balontia, M. J., Halkis, H. M., & Wibowo, A. S. 2019. Grand Strategy Poros Maritim Dunia Berhadapan dengan Belt and Road Initiative dalam Konteks Diplomasi Pertahanan. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*.
- Beaumont, D. 2014. Logistics, strategy and tactics: Balancing the art of war. *Australian Army Journal*, 11(2), 48-63.
- Bitzinger, R. A. (Ed.). 2009. *The modern defense industry: political, economic, and technological issues*. Bloomsbury Publishing USA.
- Browne, A., & Wildavsky, A. 1999. *Implementation as Mutual Adaptation* (1983). Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky, *Implementation* (3rd. ed.)(Berkeley: Univ. of California Press, 1984), 206-231.
- Bungin, B. (2008). *Metodologi buku Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Buntoro, K. (2015). Rethinking Nusantara Indonesia: Legal Approach. *Indonesian J. Int'l L.*, 13, 468.
- C Wright Mills. 1959. *The Sociological Imagination* (pp. 3–24). Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Diamond, J. M. 1998. *Guns, Germs and Steel : a Short History of Everybody for the Last 13,000 Years*. Vintage.
- Edwards, G. III 1980. *Impelementing Public Policy*. Washington City: Congressional Quarterly Press.
- Erdkamp, P. 2019. War, food, climate change, and the decline of the Roman Empire. *Journal of Late Antiquity*, 12(2), 422-465.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Hakim, L., & Irawan, I. A. 2019. Strategi Membangun Kemandirian Pangan Nasional dengan Meminimalisir Impor untuk Kesejahteraan Rakyat. *Indikator*, 3(3), 353549.
- Hamdiah, A. N., Tjahjana, M. C., & Aliansyah, A. B. (2023). Analisis Ekonomi Politik: Studi Kasus Proyek Food Estate Menuju Ketahanan Pangan Di Indonesia. *Jurnal Suara Politik*, 2(2).
- Indah Sari, M., Riswanda, R., & Nurrohman, B. 2022. *Collaborative Governance dalam Pemerintahan Lokal: Studi Tentang Relasi TNI-POLRI dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Tangerang* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik).

- Indonesia Impor Beras 3 Juta Ton pada 2023, Terbesar dalam Lima Tahun | Databoks. (n.d.). Databoks.katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/16/indonesia-impor-beras-3-juta-ton-pada-2023-terbesar-dalam-lima-tahun>
- Indonesia, B. P. S. (n.d.). Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2023 (Angka Sementara). www.bps.go.id. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/10/16/2037/luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2023--angka-sementara-.html>
- Indriastuti, D., Priluddina, M., Rusmana, R. B., & Yuliyanto, T. 2023. Tata Kelola Kolaboratif Program Ketahanan Pangan di Kodim 0733 Kota Semarang. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4613-4629.
- Indriyani, Y., Laksmono, R., Syhataria, M. I., & Uksan, A. 2022. Strategi Pertahanan Negara dalam Melindungi Sumber Energi di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Blok Ambalat & Kepulauan Natuna. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 16(1), 29-42.
- Irawati. 2023. Impor Pangan RI Meroket, Ada yang Naik 611,3 Persen Sebulan. *Infobanknews*. <https://infobanknews.com/impor-pangan-ri-meroket-ada-yang-naik-6113-persen-sebulan/>
- Kuantitatif, P. P. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Larastiti, C. 2018. Sonor dan Bias “Cetak Sawah” di Lahan Gambut. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 67-87.
- Lonsdale, D. J. 2004. *The nature of war in the information age: Clausewitzian Future*. Routledge.
- Lykke, A. F. 1989. Defining military strategy. *Military Review*, 69(5), 2-8.
- Made, I. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- Mardhani, D. 2020. Security And Defence Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(3), 279. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i3.862>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 1994. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Moleong, L. J. 2019. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Muharika, D. 2019. *Metodologi penelitian evaluasi program*. Alfabeta.
- Mujiburrohman, M. A. 2021. Civil Society–Militer Dalam Mencapai Ketahanan Pangan Di Jawa Timur. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 81-93.
- Nyoman, S. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Padillah, P., Purnaningsih, N., & Sadono, D. 2018. Persepsi petani tentang peranan penyuluh dalam peningkatan produksi padi di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Jurnal Penyuluhan*, 14(1), 1-10.
- Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI. (n.d.). <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-01160000000134/swf/3767/files/basic-html/page8.html>
- Pangan, D. J. 2011. *Ketahanan Pangan Nasional*.
- Pardede, B. J., & Pattipeilhy, S. C. H. (2020). *China’s Road To Zero Hunger: Implementasi Sustainable Development Goals Dalam Memenuhi Food Security di Republik Rakyat Tiongkok/13/HI/2020 (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science)*.

- Per Pinstруп-Andersen, Rajul Pandya-Lorch, & Policy, F. (2001). *The unfinished agenda : perspectives on overcoming hunger, poverty, and environmental degradation*. Ifpri.
- Permentan No. 05/Permentan/PP.200/2/2016 Tahun 2016. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved March 21, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/199093/permentan-no-05permentanpp20022016-tahun-2016>
- Potter, A. B. 2018. *BH Liddell Hart, Strategy (1954). The Classics of Strategy and Diplomacy*.
- Prapsetyo, A., Ahmad, I., Yanto, Y., Saptono, E., & Lestari, K. 2022. *Filosofi Arsitektur Pertahanan*. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(01), 373-388.
- Prasetya, D. Y. 2018. *Peranan Pendamping dan Partisipasi Petani dalam Program Upsus Tanaman Padi Sawah di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu*.
- Sadewo, Y. D. 2020. *Pengantar Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi*.
- Safardan, M. Y., Sulistiyanto, S., & Lelyana, N. 2023. *Strategi Kolaborasi Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Dalam Mendukung Pertahanan Negara*. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 9(1).
- Setiawan, F., & Ubaidullah, M. A. 2019. *Tumpang Tindih Peran TNI AD (Babinsa) dan Dinas Pertanian Aceh Dalam Kebijakan Swasembada Pangan Tahun 2017 (Studi Gampong Aneuk Galong Baro, Aceh Besar)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4(1).
- Setyadi, H. 2019. *Tentara Manunggal Membangun Desa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Gresik (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga)*.
- Supriyatno, M. 2014. *Tentang ilmu pertahanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suryawati, I. 2019. *Strategi Ketahanan Pangan Indonesia dalam Konstruksi Media (Analisis Framing Pada Berita Tirto. Id)*. *Komunikatif: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 8(1), 74-98.
- Tippe, S. 2017. *Redesain bela negara dalam sistem pendidikan nasional: perspektif manajemen strategi*.
- Umami, Z., Hadi, M. S., Mulyono, I. U. W., & Ningrum, N. K. 2023. *Optimalkan Ketahanan Pangan: Kolaborasi Dan Komunikasi Sosial Di Wilayah Kodam IV Diponegoro*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 7(2), 174-190.
- UU No. 18 Tahun 2012. (n.d.-b). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100>
- UU No. 34 Tahun 2004. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved March 21, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004>
- Weimer, D. L., Vining, A. R., & Vining, A. R. 2009. *An agenda for promoting and improving the use of CBA in social policy (pp. 249-272)*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Wismayana, W. M., & Pinatih, N. K. D. A. (2020). *Pandemi dan tantangan ketahanan nasional indonesia: sebuah tinjauan kritis*. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(2), 93-100.
- Yu, S., Sial, M. S., Tran, D. K., Badulescu, A., Thu, P. A., & Sehleanu, M. (2020). *Adoption and implementation of sustainable development goals (SDGs) in China—Agenda 2030*. *Sustainability*, 12(15), 6288.
- Yusri, M., Tirtayasa, S., Siregar, M. S., & Kartaatmaja, R. S. 2021. *A Confirmatory Analysis Of Food Security In North Sumatera*. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 18(1), 64-64.